

# IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

## *IDENTIFICATION SOCIAL CAPITAL IN POVERTY ALLEVIATION IN SEMARANG REGENCY*

**Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzilati**

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jl MT Haryono No 165 Malang, Jawa Timur

Email : [sugengpujiharto@gmail.com](mailto:sugengpujiharto@gmail.com)

Diterima: 12 September 2018; Direvisi: 23 Nopember 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi unsur modal sosial di desa miskin kawasan hutan. Kontradiksi antara keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dan peningkatan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tempuran menarik untuk dieksplorasi. Melalui modal sosial berusaha menjelaskan kontradiksi tersebut. Metode kualitatif dengan teknik studi kasus digunakan untuk menganalisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, perguliran ternak yang berkelanjutan, sanksi sosial, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus. Warga dusun Tepusan lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *jimpitan*, *patron klien* juragan jagung petani, *bakul* kambing. Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

**Kata kunci:** *trust, norma, jaringan, pengentasan kemiskinan.*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to identify elements of social capital in poor villages in forest areas. The contradiction between the success of the Desa Mandiri Pangan programme and the increase in the number of pre prosperous families in Tempuran Village is interesting to explore. Through social capital trying to explain the contradiction. With a qualitative case study method to analyze social capital in poverty alleviation. The results showed that trusts in the affinity group were in the form of; credibility, openness, honesty, and no harm to others. The difference in trust conditions in the sub-villages of Tepusan and Krajan has an impact on the existence of affinity groups and the development of livestock cultivation as a capital for poverty alleviation. The norm elements in the affinity group are the obligation to attend meetings, sustainable livestock revolving, social sanctions, social concerns and sincerity. Tepusan villagers more profitable from the existence of goats revolving in accordance with the norms governing affinity group activities. Forms of social networks in the affinity group are: regular meetings, jimpitan, patron clients, corn farmers, bakul goats. The networks in the affinity group can be useful in alleviating poverty in the Tempuran village.*

**Keywords:** *trust, norms, networks, poverty alleviation.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup hariannya, dan terkait dengan kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani dan keterisolasian. Kelima elemen tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam menciptakan kondisi kemiskinan atau disebut perangkap kemiskinan (Chambers, 1987).

Kabupaten Semarang adalah daerah dengan jumlah keluarga prasejahtera cukup tinggi 21,99 % pada tahun 2017 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018). Namun di Kabupaten Semarang terdapat program Desa Mandiri Pangan (DMP) dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan penanganan rawan pangan. Program DMP meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan (ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan kemasyarakatan) (Kementerian Pertanian Indonesia, 2010).

Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang merupakan desa miskin yang berbatasan dengan hutan jati Kedungjati Kabupaten Grobogan. Desa Tempuran berprestasi dalam program DMP sebagai juara III penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2014 kategori DMP (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014). Perkembangan usaha ternak kambing bergulir dalam program DMP di Tempuran meningkat pesat dari 32 ekor menjadi 396 ekor atau meningkat 12 kali lipat dalam jangka waktu 7 tahun. Akan tetapi prestasi tersebut bertolak belakang dengan kondisi kemiskinan berupa bertambahnya jumlah keluarga prasejahtera dari 135 keluarga pada tahun 2011 menjadi 164 keluarga pada 2017 (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Semarang, 2017).

Masyarakat desa Tempuran sangat bergantung pada sumber daya hutan Kedungjati. Kerusakan hutan akibat penjarahan kayu menjadikan lahan hutan di sekitar desa Tempuran menjadi gundul. Oleh sebagian besar warga desa, lahan tersebut dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung. Namun sejak akhir tahun 2012 Perum Perhutani sebagai pengelola hutan Kedungjati mengadakan kerjasama dengan investor Korea dalam budidaya *Glirisdia* di KPH Semarang termasuk hutan sekitar desa Tempuran (Perhutani, 2013). Dampak dari kerjasama tersebut masyarakat kehilangan lahan garapan jagung akibat alih fungsi lahan jagung menjadi lahan *Glirisdia* yang tidak menguntungkan masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kondisi kemiskinan di desa Tempuran.

Angka kemiskinan di tingkat desa tercermin dalam data keluarga prasejahtera hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Dalam mengukur angka kemiskinan pemerintah menggunakan metode pengukuran secara kuantitatif (objektif) seperti pendataan keluarga oleh BKKBN. Pendekatan kuantitatif telah membuktikan bahwa generalisasi, obyektivitas, dan keterukuran telah membantu memahami fenomena ilmu sosial yang rumit. Namun setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu sehingga tidak bisa digeneralisir, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif (Yustika, 2013).

Di Kabupaten Semarang terjadi peningkatan jumlah keluarga prasejahtera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011 terdapat 70.299 keluarga prasejahtera dan meningkat menjadi 78.164 keluarga prasejahtera pada tahun 2015. Hal ini

disebabkan pada variabel lantai yang sebagian besar masih berupa tanah, dinding dan atap yang layak pada sebagian rumah yang dimiliki oleh keluarga belum terealisasi (Kabupaten Semarang, 2016). Dari indikator lantai tanah, tidak bisa serta merta membuktikan angka kemiskinan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks, dengan pendekatan kualitatif berusaha memberikan daya penjabar atas fenomena tersebut.

Terdapat berbagai penelitian tentang modal sosial berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Grootaert, (1999) menemukan bahwa modal sosial berkorelasi positif terhadap kesejahteraan penduduk di Indonesia. Kemudian Grootaert, (2001) mengabungkan kondisi di Bolivia, Burkina Faso dan Indonesia menyatakan bahwa modal sosial berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di tingkat rumah tangga. Dan modal sosial berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan melalui akses pekerjaan (Zhang, Zhou, & Lei, 2017), modal sosial mempermudah anggota komunitas dalam mengakses pembiayaan keuangan mikro (Akram & Routray, 2013), modal sosial mampu merubah pola pikir nelayan (Kusuma, Satria, & Manzilati, 2017), modal sosial mempermudah akses kesehatan (Sujarwoto & Tampubolon, 2013), modal sosial berpengaruh pada gizi balita (Vikram, 2018). Modal sosial berpengaruh pada kemiskinan melalui sektor pertanian (van Rijn, Nkonya, & Adekunle, 2015), modal sosial pada program pertanian PUAP (Situmorang, Manzilati, & Kaluge, 2012). Namun sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian tentang analisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa perbatasan hutan melalui program DMP.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi

modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran yaitu desa miskin di pinggiran kawasan hutan. Desa Tempuran merupakan desa yang berprestasi dalam perkembangan ternak DMP, namun justru angka kemiskinan semakin bertambah. Perkembangan suatu komunitas (termasuk DMP) dalam mencapai tujuan kelompok dipengaruhi oleh modal sosial dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di Desa Tempuran dalam kegiatan DMP.

### **Kemiskinan di Perdesaan**

Todaro dan Smith (2011) menyatakan di negara berkembang sebagian besar orang miskin hidup di perdesaan, dengan aktivitas utama pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Mayoritas masyarakat miskin tinggal di desa, dalam mengentaskannya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor jasa di kota berpengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan di desa dan dikota. Diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan sangat penting.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Program PNPM Mandiri telah membantu mendorong pendapatan masyarakat desa Kadisoka Sleman Yogyakarta melalui peningkatan tata kelola ekonomi masyarakat yang lebih terstruktur (Jati, 2013). Pemberdayaan masyarakat desa melalui budidaya tanaman sayur dan perkebunan di Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suyanto & Bambang Pudjianto, 2015). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah

tertinggal Kabupaten Garut (Roebyantho & Unayah, 2014). Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sendangmulyo Kabupaten Rembang mampu memanfaatkan potensi lokal meskipun hanya dengan teknologi sederhana (Muhtar, 2012).

Kemiskinan merupakan masalah utama secara jangka panjang yang harus digarap secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan konsistensi dalam program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tidak bisa tuntas dikarenakan setiap pergantian pemimpin diikuti pergantian program sehingga tidak ada keberlanjutan program sebelumnya (Multifah, 2011).

Salah satu perangkap kemiskinan adalah kerentanan, kerentanan pangan sangat berpengaruh dalam kemiskinan. Smith, Rabbitt, dan Coleman (2017) menemukan bahwa modal sosial yang lemah menjadi faktor penentu tingkat kerawanan pangan rumah tangga, selain faktor rendahnya pendidikan, lemahnya jaringan sosial, rendahnya tingkat pendapatan dan dalam kondisi pengangguran. Oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan sosial dan kebijakan pertanian karena sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan (Croppenstedt, Knowles, & Lowder, 2017).

### **Modal sosial**

Coleman (2008) mendefinisikan modal sosial menurut fungsinya, yaitu modal sosial itu bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial. Kedua, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku dalam struktur tersebut. Sedangkan menurut Woolcock dan Narayan (2002) modal sosial mengacu pada norma dan jaringan yang memudahkan manusia dalam kegiatan kolektif. Modal

sosial ini bertujuan pada sumber daya, bukan konsekuensi modal sosial seperti kepercayaan dan hubungan timbal balik.

Sedangkan menurut Damsar dan Indriyani (2009), modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya. Oleh karena itu modal sosial menjadi bagian penting pendukung kegiatan DMP dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi modal sosial dari beberapa pakar, namun ketiga unsur modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan layak digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis modal sosial di suatu wilayah.

Fukuyama (2002) menyakini bahwa kepercayaan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, beberapa daerah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat karena rendahnya kepercayaan atau terbatasnya jangkauan kepercayaan. Fukuyama (2002) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Dengan demikian *trust* menjadi penting untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui kegiatan DMP.

Jaringan menurut Lawang (2004) yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Sebagaimana jaringan dalam konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana didalamnya terdapat informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan. Menurut

Yustika (2013) modal sosial dalam pandangan jaringan, menekankan pentingnya hubungan secara vertikal dan horizontal diantara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi lain. Menurut konsep jaringan, modal sosial berperan sebagai ikatan (*bonding*) dalam komunitas (*intracommunity*) dan sebagai jembatan (*bridging*) antar komunitas (*intercommunity*).

Menurut Coleman (2008) norma menentukan tindakan apa saja yang dianggap benar dan tidak benar oleh sekelompok orang. Norma biasanya ditegakkan dengan sanksi berupa imbalan bagi yang mematuhi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Seorang individu merasa mendapatkan imbalan secara batin dengan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku, namun sebaliknya merasakan mendapatkan hukuman secara batin apabila melanggar norma tersebut.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian kualitatif ingin mengetahui secara mendalam tentang kondisi pengentasan kemiskinan di perdesaan secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan keadaan yang diteliti. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017)

Lokasi penelitian adalah Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang terletak di perbatasan hutan Kedungjati. Desa Tempuran adalah desa yang berprestasi dalam ketahanan pangan namun tingkat kemiskinan

masih cukup tinggi. Unit analisis pada studi kasus yang digunakan adalah individu atau rumah tangga miskin pengurus dan anggota kelompok afinitas program DMP. Pemilihan tersebut dengan alasan untuk lebih mengetahui secara mendalam bentuk modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma serta perannya dalam proses pengentasan kemiskinan di Desa Tempuran.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari:
  1. Pengurus kelompok afinitas DMP
  2. Warga miskin anggota kelompok afinitas DMP
- b. Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari:
  1. Tokoh masyarakat desa Tempuran
  2. Penyuluh Pertanian

Teknik penentuan informan berdasarkan kriteria informan dengan pertimbangan pengetahuan informan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di kelompok afinitas DMP. Teknik pengumpulan informasi menggunakan metode triangulasi yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi (Herdiyansyah, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu program pengentasan kemiskinan di desa Tempuran adalah program Desa Mandiri Pangan. Di desa Tempuran terdapat dua kelompok afinitas di dusun Krajan dan Tepusan. Anggota afinitas merupakan warga miskin yang rawan pangan. Dengan pemberian

modal usaha yang produktif dan berkelanjutan berupa ternak kambing, maka diharapkan warga miskin mampu terlepas dari jurang kemiskinan yang dialaminya.

Untuk mengetahui informasi tentang unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa miskin perbatasan hutan maka dipilihkan sampel 12 orang warga miskin anggota kelompok afinitas DMP Tempuran. Dilakukan wawancara dengan beberapa pihak sesuai kriteria informan.

### **Unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran.**

Kebijakan kerjasama Perhutani dengan *Korea Green Promotion Agency* (KGPA) dalam penanaman biomassa *Gliricidia*, di hutan sekitar Desa Tempuran menyebabkan warga kehilangan lahan garapan jagung. Hal tersebut berdampak besar dalam pendapatan petani. Kondisi pertanian padi yang subsisten tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup warga. Untuk menunjang kelangsungan hidupnya warga mengandalkan ternak kambing yang dimilikinya dari program DMP. Keberlanjutan kegiatan DMP dipengaruhi oleh unsur modal sosial dalam kelompok afinitas di Desa Tempuran berupa:

### **Trust (saling percaya)**

#### **1. Kredibilitas**

Proses pengentasan kemiskinan melalui akses permodalan ternak kambing membutuhkan *trust* sebagai dasarnya. Modal sosial bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah mendapatkan penghargaan (*reward*) daripada individu yang tidak memiliki kredibilitas (Yustika, 2013). Oleh karena itu hanya calon anggota yang kredibel saja yang mendapatkan perguliran ternak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kelompok afinitas dusun Tepusan:

*“Kadang kiyambake niku karep tur tanggungjawab. Lha niku, kiro kiro wonge mboten tanggungjawab mboten kulo kei” (Kadang orangnya itu mau dan tanggungjawab. Lha itu, kira kira orangnya tidak tanggungjawab tidak kami beri). (wawancara 10 Juni 2018)*

Atas dasar kredibilitas anggota maka pengurus berupaya menjaga kegiatan kelompok afinitas mampu berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kredibilitas tersebut lahir dari kepercayaan *prosesual* melalui interaksi sosial yang intens antara pengurus dengan calon anggota afinitas.

#### **2. Keterbukaan**

Fukuyama (2002) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Keterbukaan berupa penyampaian laporan penggunaan dana kelompok dalam forum pertemuan kelompok afinitas menumbuhkan rasa saling percaya yang ada antara anggota dengan pengurus kelompok. Sebagaimana yang disampaikan Pht berikut ini:

*“Ngih enten laporane. ada, kangge nopo mawon enten catetane. lha le seneng kan ngoten niku.” (Ya ada laporannya untuk apa saja ada catatannya. Kami senangnya karena hal keterbukaan itu) (wawancara tanggal 6 Juli 2018).*

Selain itu terdapat transaksi *disusuki* yang melibatkan pedagang kambing sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antara anggota dengan pengurus kelompok. *Disusuki* merupakan kegiatan membeli

sendiri anak kambing hasil perguliran. Apabila kambing yang dipelihara oleh anggota kelompok melahirkan anak kambing jantan maka akan dijual dan dibeli kambing betina untuk digulirkan ke calon anggota yang lain. Pelibatan pedagang kambing sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan perguliran ternak DMP.

### 3. Kejujuran

Di kelompok afinitas dusun Krajan, kondisi rasa percaya anggota terhadap pengurus sudah berkurang, akibat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan dana kelompok. Kurang terbukanya pengurus kelompok afinitas dusun Krajan terlihat dalam proses pelaporan keuangan hasil perguliran. Dalam perguliran kambing apabila beranak jantan maka akan di jual dan ditukar dengan betina. Harga kambing jantan lebih mahal dibandingkan harga kambing betina. Sehingga terdapat selisih harga, namun hal itu tidak disampaikan oleh pengurus. Berikut ini pernyataan Sml anggota afinitas dusun Krajan sebagai berikut:

*“... Jenenge lanang tumbas ke wedok kan mboten sami regine. Ngoten niku mboten enten laporane turahane limpahan. Ngantos sak menten mboten nate. Mangkane kulo jane mboten wegah, le males mboten derek niku wau mboten enten laporane terbuka ngoten” (Kambing jantan dibeli kambing betina kan harganya tidak sama. Seperti itu tidak ada laporan sisa perguliran. Sampai sekarang tidak pernah. Oleh karena itu saya sebenarnya saya tidak mau, penyebab malas ikut itu tidak ada laporan terbuka seperti itu) (wawancara, 2 Agustus 2018)*

Sikap jujur, keterbukaan dari pengurus

berdampak terhadap perkembangan kelompok. Kejujuran dari ketua kelompok afinitas dusun Tepusan, dirasakan oleh anggota afinitas sehingga mampu menggerakkan kegiatan kelompok. Kondisi sebaliknya terjadi pada ketua kelompok afinitas dusun Krajan, hilangnya *trust* berdampak pada kemacetan pertemuan kelompok afinitas. Hal ini sesuai dengan penelitian (Putri & Hidayat, 2011) bahwa aspek modal sosial memiliki hubungan dengan eksistensi kelompok, dengan adanya modal sosial yang baik, maka keberlanjutan kelompok tetap terjaga.

### 4. Tidak Merugikan Orang Lain

Ketersediaan pakan ternak merupakan unsur penting dalam budidaya ternak kambing. Di desa Tempuran terdapat dua perilaku sosial dalam kegiatan mencari *rambanan* yang berbeda antara dusun Tepusan dengan dusun Krajan. Di dusun Tepusan masyarakat saling percaya antar warga dalam mencari pakan ternak yaitu *rikuh mriku gadah ingon ingon kiyambak*. Jadi sesama warga dusun Tepusan ada rasa sungkan apabila mengambil pakan ternak dilahan orang lain sehingga terwujud rasa aman terhadap orang lain. Perilaku tersebut disampaikan oleh Pht, Trn, dan Jrm. Berikut ini pernyataan Trn ini:

*Ngih rikuh, mpun gadah kiyambak koq, le ngarit kan nggih mboten kepenak, ting teban niko kan bebas ngih. (Ya sungkan, sudah punya sendiri koq. Mencari rumput ya tidak enak, di hutan sana kan bebas ngih) (wawancara, 1 Agustus 2018)*

Sedangkan masyarakat dusun Krajan, tidak menanam pohon *rambanan* di lahan garapan sendiri. Masyarakat dusun Krajan tidak percaya dengan warga disekitarnya dikarenakan sering terjadi pencurian

rambanan dilahan warga. Berikut pernyataan Sml tentang pencurian *rambanan*:

*“.. Lha sing gadah rekane di ingu gawe ramban rambanan, tiyange sing mendet asal ditebang ngoten” (... Lha yang punya inginnya ditanam buat rambanan, orang yang ambil asal tebang begitu) (wawancara 2 Agustus 2018)*

Perbedaan kondisi tersebut juga disampaikan oleh An berikut ini:

*“Kalau di dusun glompong dan tepusan kan pada menanam pohon mlanding, atau nanam pohon untuk pakan ternak dilahan garapan masing masing. Sedangkan di sini dibiarkan saja, grumbul grumbul tidak naman untuk pakan ternak dikarenakan takut diambil orang. Pada tidak nanam jadinya kalau nanam malah diambil orang” (wawancara 20 Juli 2018)*

Di dusun Tepusan adanya perasaan sungkan tersebut menjadikan hubungan antar warga di dusun berjalan dengan harmonis, jarang terjadi konflik masalah pengambilan pakan ternak. Hal tersebut meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama warga dusun Tepusan. Sedangkan perilaku asal tebang dalam mencari rambanan menjadikan perasaan curiga dan tidak percaya dengan warga yang lain. Perilaku tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antar sesama warga dusun. Dampaknya warga jarang menanam pohon rambanan di lahan garapan sendiri.

Menurut Barnes (2003), kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra. Sikap saling percaya menghasilkan rasa aman sesama warga terlihat interaksi sosial pada warga dusun Tepusan namun hal ini tidak terjadi pada

warga dusun Krajan.

Unsur *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; tanggungjawab, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi unsur *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada perkembangan kelompok dan budidaya ternaknya sebagai modal usaha pengentasan kemiskinan.

## **Norma**

Norma kelompok adalah pedoman pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Norma muncul melalui proses interaksi diantara anggota kelompok. Menurut Putnam (Haryanto, 2011) norma dibangun dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama.

### **1. Kewajiban Hadir Pertemuan**

Tata aturan yang ada dalam kelompok afinitas berupa kewajiban menghadiri pertemuan kelompok afinitas. Hal ini merupakan aturan yang diterapkan di kelompok afinitas kepada setiap anggota yang sedang mendapatkan perguliran maupun yang sudah mengembalikan perguliran. Atas dasar aturan tersebut interaksi sosial dalam pertemuan kelompok bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan Iwn anggota afinitas berikut ini:

*“Kan wes di janji sak derange angsal ngoten niku, pokoke nak kumpulan kudu melu ngoten niku. Dadose enten kempalan ngih mlampah. Mung niku ngeh corone do tanggungjawab”. (Kan sudah berjanji sebelum dapat itu, pokoknya kalau kumpulan harus ikut seperti itu. Sehingga setiap pertemuan ya jalan. Itukan sebagai cara bertanggungjawab) (wawancara 6 Juli 2018)*

Sedangkan kebiasaan warga Tepusan dengan Krajan berbeda dalam ketertiban menghadiri pertemuan kelompok. Seperti pernyataan Mjm Penyuluh Pertanian berikut ini:

*“Sampai sampai itu ada pertemuan kalau kelompok tani itu ada pertemuan rutin selapan sekali, tingkat kehadiran itu jauh berbeda. Kalau ditepusan itu bisa delapan puluh lima keatas tingkat kehadiran anggota kelompok selapanan. Tapi kalau dikrajan paling lima puluh persen susah”.* (wawancara 6 Juli 2018)

Dengan diadakannya norma wajib datang pertemuan kelompok maka kegiatan kelompok afinitas dapat berjalan dengan baik, perkembangan ternak kambing dapat termonitor, mempermudah akses informasi kepada anggota kelompok.

## 2. Sanksi Sosial

Norma biasanya ditegakkan dengan sanksi yang berupa imbalan karena melakukan tindakan yang dipandang benar atau hukuman karena melakukan tindakan yang dipandang tidak benar (Coleman, 2008). Bentuk sanksi sosial yang diterima pengurus maupun anggota afinitas apabila melanggar kesepakatan adalah *digrenengi* atau digunjingkan. Bagi anggota afinitas yang tidak berangkat pertemuan juga menerima sanksi berupa ditegur oleh sesama anggota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Trn berikut ini:

*“Do di lorohi ngoten niku. Otomatis ngih di lorohi, katah katah do mlampah, umpami enten ngih siji loro. Kadang pas enten perlu”.* (Pada ditegur seperti itu. Otomatis ya ditegur, kebanyakan pada jalan, seumpama ada ya satu dua, terkadang saat ada keperluan) (wawancara 2 Agustus 2018)

## 3. Mempertahankan Aset

Terdapat kesepakatan di kelompok afinitas Tepusan bahwa kambing perguliran tidak boleh dijual habis agar tetap mendapatkan manfaat dari budidaya kambing. Berikut ini pernyataan Pht:

*“Sing mbokne kan mboten angsal disade kersane tambah terus, turi ne kan menambah penghasilan kita pak. Kan dadine mbokne kuwi turun temurun saget manak terus mriki, ngoten niku”.* (Induknya kan tidak boleh dijual agar tambah terus, katanya menambah pendapatan kita pak, Jadinya induknya itu turun temurun bisa beranak terus disini, begitu itu) (wawancara, 6 Juli 2018)

Menurut Chambers (1987) perangkat kemiskinan berupa kerentanan akibat dari tidak adanya aset yang dimiliki oleh warga miskin. Melalui norma mempertahankan aset ternak produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

## 4. Kepedulian Sosial

Di kelompok afinitas terdapat bentuk kepedulian sosial dari pengurus kepada warga miskin anggota afinitas. Kepedulian tersebut dalam bentuk *yen majer diijoli* atau jika mandul di ganti. Suka duka dalam memelihara kambing pada setiap anggota tidak sama. Adakalanya kambing tersebut beranak kembar dua atau tiga, namun juga ada yang lama tidak bunting, sebagaimana yang disampaikan Jrm berikut ini:

*“Mendone kulo niku jero, dangu sanget nembe manak, dadose coro niku kulo ngih bangkrut”* (Kambing saya itu dalam, lama banget baru beranak. Seperti caranya saya ya rugi bangkrut) (wawancara 6 Juli 2018)

Menyikapi kondisi yang merugikan

anggota maka pengurus melakukan tindakan berupa mengganti dengan kambing yang lebih baik. Berikut pernyataan Msm:

*“Nak majer diijolke. Disade terus ditumbaske”. (Kalau mandul ditukar, dijual kemudian dibelikan) (wawancara, 10 Juni 2018)*

Sisa hasil penjualan kambing tersebut diserahkan kepada anggota yang memelihara kambing tersebut sebagai ganti rugi bentuk kepedulian sosial dalam kelompok afinitas. Menurut Damsar dan Indriyani (2009) norma resiprositas merupakan moral utama bagi perilaku antar individu; antara petani dan sesama warga desa. Prinsip tersebut berdasarkan gagasan bahwa orang harus membantu orang yang pernah membantu kita atau minimal tidak merugikannya. Hal ini terlihat pada anggota dalam kegiatan kelompok atas dasar pernah dibantu modal usaha ternak kambing oleh pengurus afinitas dan eksistensi kepedulian sosial di masyarakat desa.

## 5. Keikhlasan Pengurus

Di kelompok afinitas terdapat unsur keikhlasan pengurus dalam mengelola organisasi, sebagaimana yang disampaikan Pht berikut ini:

*“Halah niku, mboten nopo nopo. Kulo sing penting niku podo do saling percaya, lek nganu niku. Niki pengurus mboten anu nopo nopo. Wes kene ikhlas lah ngurusi niku mboten nopo nopo. .. kene seneng do rukun ngoten mawon pun remen. Penguruse saget berjalan lancar ngoten mawon pun remen”. (Halah itu, tidak dapat apa apa, saya yang penting itu sama saling percaya, seperti itu. Ini pengurusnya tidak mendapatkan apa apa, Sudah kita ikhlas mengurus itu tidak apa apa... sini senang pada rukun begitu saja sudah senang. Pengurusnya*

*dapat berjalan lancar saya sudah senang) (wawancara 6 Juli 2018)*

Unsur keikhlasan mampu menggerakkan kegiatan di kelompok afinitas dusun Tepusan. Sikap keikhlasan pengurus menunjukkan bentuk aktualisasi diri pengurus. Sesuai dengan teori hirarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya (Iskandar, 2016)

Namun kondisi sebaliknya terdapat di kelompok afinitas dusun Krajan. Belum adanya kesepakatan akan imbalan jasa kepada pengurus mengurangi semangat dalam mengelola kegiatan. Sebagaimana pernyataan Skm berikut ini:

*“Tapi do bubar, soale sing ngurusi suwe suwe ora entuk opo opo. Kulo ngih mboten mendet.” (Tapi pada bubar, karena yang mengurus lama lama tidak dapat apa apa. Saya ya tidak mengambil). “Suwe suwe kan pengurus nak mboten enten nganune kan pengurus kan nyita waktu, nak mboten ikhlas pikirane kan wegah”. (Lama lama kan pengurus kalau tidak ada anunya kan pengurus kan menyita waktu. Kalau tidak ikhlas pikirannya kan tidak mau) (wawancara 22 Mei 2018)*

Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, mempertahankan aset ternak, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus berpengaruh terhadap perkembangan kelompok dalam pengentasan kemiskinan.

## Jaringan

Jaringan menurut Lawang (2004) yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Sebagaimana jaringan

sesuai konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana didalamnya terdapat informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan.

## 1. Pertemuan rutin

Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas dusun Tepusan adalah pertemuan rutin kelompok. Dalam pertemuan kelompok tersebut dibahas pelaporan perkembangan ternak oleh masing masing anggota, serta pelaporan dana kelompok oleh pengurus.

Dana kas kelompok digunakan untuk membantu anggota dalam usaha pertanian sebagaimana pernyataan Pht berikut ini:

*“Wong ngih sisa le ngembangke kan enten, iuran ngoten niku, di klumpukke damel tumbas obat obatan nak niki ajeng nanem. Kan obat rumput niko. Ngih damel simpan pinjam. (Kan sisa perguliran kan ada, iuran seperti itu, dikumpulkan untuk beli obat obatan kalau mau mulai tanam. Seperti obat rumput itu. Ya juga buat simpan pinjam) (wawancara 6 Juli 2018)”*.

Dengan adanya jaringan yang kuat didukung oleh saling percaya berdasarkan tata aturan yang berlaku. Maka anggota kelompok afinitas dapat merasakan manfaat ekonomi berupa akses permodalan usaha tani dari dana kas kegiatan kelompok afinitas.

## 2. Patron Klien Juragan

Jaringan *patron-klien* antara juragan jagung dengan warga miskin terjadi di desa Tempuran. Hubungan *patron-klien* terdapat ketimpangan karena patron berada dalam posisi pemberi barang atau jasa sedangkan klien mempunyai kewajiban membalas barang atau jasa pada patron. Barang atau

jasa yang dipertukarkan oleh *patron-klien* mencerminkan adanya kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak.

Fenomena *patron-klien* merupakan hal yang lumrah ditemukan pada masyarakat agraris (pertanian). Hal yang sama juga ditemukan dalam masyarakat desa Tempuran, sebagaimana pernyataan Ik berikut ini:

*“Biasane nak wong modal mbaon niku utang kalih nganune, sing juragan jagunge, mangkeh kan jagunge dipendet mriku. Utang mess, utang wineh, trus obat semprot ngiten niku, kulo yo ngono mas”. (Biasanya kalau orang modal tanam jagung di lahan hutan itu hutang dengan juragan jagung, nanti jagungnya diambil dia. Hutang pupuk, hutang benih, dan obat semprot seperti itu, saya juga seperti itu mas). (wawancara 19 Mei 2018)*

Jaringan juragan jagung dengan warga miskin bersifat saling menguntungkan dikarenakan petani miskin mendapatkan modal usaha pertanian yang tidak bisa disediakan oleh lembaga keuangan formal, berbagai fasilitas diterima petani seperti pupuk, benih dan obat obatan yang diantar ke rumah petani, dan hasil panen jagung juga diambil dari rumah petani sehingga petani mengurangi biaya transaksi. Bagi juragan jagung mendapatkan manfaat berupa keuntungan dari penjualan pupuk dan benih, serta keuntungan dari pembelian jagung dari petani.

Kondisi petani tidak bisa mengakses kredit perbankan dikarenakan terkendala peraturan perbankan. Sehingga petani terpaksa bekerjasama dengan juragan jagung dalam bertani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bastelaers (2000)

(dalam Syahyuti, 2008), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenuhi permodalan.

### 3. Permasalahan

Menurut Syahyuti (2008) perdagangan hasil pertanian termasuk hewan ternak di Indonesia secara umum bekerja dalam bentuk pasar yang tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan tersebut diindikasikan oleh lemahnya kelembagaan pasar secara struktural dan kultural, biaya transaksi yang besar sehingga tidak efisien, struktur informasi yang tidak sempurna dan seimbang. Menghadapi kondisi seperti itu, maka modal sosial menjadi semakin penting. Dalam membentuk jaringan pemasaran hasil pertanian dibutuhkan reputasi dan relasi sebagai modal sosial.

Reputasi merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan pengalamannya dimasa lalu. Relasi yang sudah berlangsung lama antara pedagang dengan pemasok langganan merupakan pola yang umum. Relasi ini umumnya melebihi batasan keluarga, agama, dan etnik. Seorang pedagang yang memiliki hubungan yang dekat dengan pemasok, maka ia dapat melakukan pemesanan. Hubungan yang kuat dengan pemasok dapat menghindarkan pedagang dari kerugian karena buruknya kualitas barang (Wiratanaya, 2010).

Bagi warga desa Tempuran jaringan antara bakul dengan peternak kambing sudah terbentuk sejak lama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pola transaksi penjualan maupun pembelian kambing hanya melalui bakul kambing.

Berikut ini pernyataan Wrn tentang cara menjual kambing miliknya:

*“Halah ngundang blantik, mas aku duwe wedus, tukune, dagang wong wetan kali mriko”. (Halah manggil blantik, mas saya punya kambing, silahkan dibeli, pedagangannya orang timur sungai sana) (wawancara 2 Agustus 2018)*

Peternak kambing menganggap transaksi melalui *bakul* (pedagang) lebih menguntungkan karena mengurangi biaya transaksi seperti transportasi jika dibandingkan dengan penjualan langsung ke pasar hewan. Berikut pernyataan Nsr yang memilih menjual lewat *bakul* daripada ke pasar hewan:

*“Ngih sae pokoke kaceke kalih teng bringin ngih satus, nak mboten nate teng peken, sing mboten kulino malah mboten saget. le ngenyang sak sake ngoten niku. nak pun kalih blantik niku pun saget sae. kacek, kange ongkose niku wau, nak mendo niku pun dipunduti mriki”.*

(Ya bagus pokoknya selisihnya dengan di Bringin ya seratus ribu. Kalau tidak pernah ke pasar, yang tidak terbiasa malah tidak bisa, Penawarannya jelek seperti itu. Kalau sudah dengan blantik itu bisa baik harganya. Selisih untuk ongkosnya itu tadi. Kan kambing itu sudah diambil langsung kesini) (wawancara 2 Agustus 2018)

### 4. Jimpitan

Jimpitan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat perdesaan yang masih terjaga sampai sekarang di dusun Tepusan. Jimpitan sebagai modal sosial memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga desa dari sisi pemberdayaan ekonomi dan keamanan lingkungan karena jimpitan melekat pada kegiatan jaga malam. Berikut penjelasan Msm tentang pemanfaatan uang jimpitan:

“Nak jimpitan niki menawi ndalu dikumpulke trus niki mpun ditumbaske mendo angsal setunggal. Nembe setahun entuk duwit sewu limang atus”. (Kalau jimpitan ini saat malam dikumpulkan lalu ini sudah dibelikan kambing dapat satu. Baru satu tahun dapat uang satu juta lima ratus). (wawancara, 22 Mei 2018)

Dana jimpitan digunakan untuk pengentasan kemiskinan berupa *gadohan* kambing. Sebagaimana yang disampaikan Iwn berikut ini.

“Saget ngempal katah artone jimpitan, tahun wingi di tumbaske mendo. Niku kan dikembangke.” (Dapat mengumpulkan banyak uangnya, tahun kemarin dibelikan kambing, Kalau itu dikembangkan) (wawancara 6 Juli 2018)

Temuan tentang dana jimpitan yang dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan berupa *gadohan* di dusun Tepusan berbeda dengan dana jimpitan di Yogyakarta. Harsono (2014) menyatakan bahwa hasil jimpitan digunakan warga untuk perbaikan sarana publik di Danunegaran Yogyakarta. Jimpitan yang ditujukan sebagai pengikat tali silaturahmi (*bonding*) warga, ternyata mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar

Pelaksanaan jimpitan hanya di dusun Tepusan, sedangkan di dusun Krajan sudah tidak dilaksanakan tetapi dirubah dalam bentuk iuran kas RT. Dan dana tersebut digunakan untuk pembelian inventaris RT berupa alat pesta. Berikut penjelasan Skm tentang hal tersebut:

“Jimpitan sak niki mriki daripada njupuki ben dino, bulanan. Jadi setiap satu hari satus perak, dadi nak sasi pisan bayar tigang ewu”. (Jimpitan sekarang disini daripada diambil setiap hari,

bulanan. Jadi setiap hari seratus rupiah, jadi kalau sebulan sekali bayar tiga ribu) (wawancara 22 Mei 2018)

Modal sosial jaringan yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *patron klien* juragan jagung petani, pedagang kambing, jimpitan. Jaringan tersebut bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran melalui terciptanya akses ekonomi berupa permodalan dan kemudahan menjual hasil peternakan dan pertanian.

## KESIMPULAN

Unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran meliputi trust, norma dan jaringan. Unsur *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Kelompok afinitas di dusun Tepusan lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan kelompok afinitas di dusun Krajan karena pengaruh dari *trust* dalam kelompok tersebut.

Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, mempertahankan aset ternak, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus berpengaruh terhadap perkembangan kelompok dalam pengentasan kemiskinan. Warga dusun Tepusan lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas.

Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *patron klien* juragan jagung petani, bakul kambing dan jimpitan. Jaringan yang ada

dalam kelompok afinitas mempermudah anggota dalam mengakses modal usaha pertanian, mempermudah penjualan ternak dan hasil pertanian. Sehingga bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

## SARAN

Keberhasilan masyarakat desa Tempuran mengembangkan perguliran ternak, patut dicontoh sebagai cara mengentaskan kemiskinan di perdesaan dengan melibatkan unsur modal sosial.

Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada di desa. Sehingga perlu campur tangan Pemerintah desa dalam membina penerima program tersebut baik perorangan maupun kelompok agar tetap berkelanjutan. Indikator modal sosial dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di perdesaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini yaitu: Kelompok Afinitas Sinar Rejeki dusun Tepusan dan Krajan Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bringin, Pusbindiklatren Bappenas yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akram, S., & Kumar Routray, J. (2013). Investigating causal relationship between social capital and microfinance. *International Journal of Social Economics*, 40(9), 760–776. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2012-0113>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2017). *Kecamatan Bringin Dalam Angka 2017*. Ungaran.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

(2018). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*. Semarang.

- Barnes, J. G. (2003). *Secrets of Customer Relationship Management (Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan)*. Yogyakarta: Andi.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Coleman, J. (2008). *Dasar dasar teori sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Croppenstedt, A., Knowles, M., & Lowder, S. K. (2017). Social protection and agriculture: Introduction to the special issue. *Global Food Security*, 16(August 2017), 65–68. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.09.006>
- Damsar, & Indriyani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2014). penerima-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-2014. Retrieved from <http://data.jatengprov.go.id/dataset/penerima-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-tingkat-provinsi-jawa-tengah-tahun-2014>
- Fukuyama, F. (2002). *Trust; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Grootaert, C. (1999). Social Capital, Household welfare and Poverty in Indonesia. *Local Level Institutions Working Paper*. Washington DC: The Word Bank.
- Grootaert, C. (2001). LLI 10 - Does Social Capital Help The Poor? A Synthesis of Findings From the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina

- Faso and Indonesia. *Local Level Institutions*, (10).
- Harsono, W. (2014). Jimpitan, Modal Sosial yang menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, 18(2), 131–145.
- Haryanto, S. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Herdiyansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar. (2016). Implementasi teori hirarki kebutuhan abraham maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah*.
- Jati, W. R. (2013). Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri di yogyakarta. *Sosio Konsepsia*, 18(3), 331–344.
- Kabupaten Semarang. (2016). *Perda Kab Semarang No 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab Semarang Tahun 2016 - 2021*.
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2010). *Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan 2010*.
- Kusuma, U. A., Satria, D., & Manzilati, A. (2017). Modal Sosial dan Ekowisata : Studi Kasus di Bangsring Underwater, Banyuwangi. *JIEP*, 17.
- Lawang, R. (2004). *Kapital sosial dalam prespektif sosiologi: suatu pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Muhtar. (2012). Pengembangan Masyarakat Dengan Memanfaatkan Aset Lokal ; Studi Deskriptif di Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo yang berbatasan dengan Hutan Jati. *Sosio Konsepsia*, 17(01), 101–116.
- Multifah. (2011). Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 1–27.
- Perhutani. (2013). Perhutani Gandeng Korea Penanaman Wood Pellet. Retrieved from <http://www.perhutani.co.id/2013/11/perhutani-semarang-gandeng-korea-penanaman-wood-pellet/>
- Putri, I. F., & Hidayat, H. (2011). Analisis Persepsi Modal Sosial dan Hubungannya Dengan Eksistensi Kelompok Tani: Kasus pada Kelompok Tani Wanita “ Sri Sejati 2 ”. *Wacana*, 14(1), 11–17.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam penelitian kualitatif; konsep dan prosedurnya. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330.
- Situmorang, E. R., Manzilati, A., & Kaluge, D. (2012). Modal Sosial Dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kabupaten Manokwari. *SEPA*, 8(2), 104–115.

- Smith, M. D., Rabbitt, M. P., & Coleman-Jensen, A. (2017). Who are the World's Food Insecure? New Evidence from the Food and Agriculture Organization's Food Insecurity Experience Scale. *World Development*, 93, 402–412. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.006>.
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2013). Mother's social capital and child health in Indonesia. *Social Science and Medicine*, 91, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.04.032>.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1), 109–117. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.08.003>.
- Suyanto, & Bambang Pudjianto. (2015). Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera di kabupaten sragen. *Sosio Konsepsia*, 5(01), 1–22.
- Syahyuti. (2008). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. *Forum Peneliti Agro Ekonomi*, 26(1), 32–43.
- Todaro, M. ., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- van Rijn, F., Nkonya, E., & Adekunle, A. (2015). The impact of agricultural extension services on social capital: an application to the Sub-Saharan African Challenge Program in Lake Kivu region. *Agriculture and Human Values*, 32(4), 597–615. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9580-9>.
- Vikram, K. (2018). Social capital and child nutrition in India: The moderating role of development. *Health and Place*, 50(January), 42–51. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.007>.
- Wiratanaya, G. N. (2010). Modal Sosial Kelompok Ternak sebagai Pelaku Perdagangan Hasil Usaha Peternakan di Bali. *DwijenAGROAGRO*, 2(1).
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2002). Social Capital: Implications for Development theory and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>.
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Zhang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social Capital and Its Contingent Value in Poverty Reduction: Evidence from Western China. *World Development*, 93, 350–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>.